



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

- (1) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (2) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (3) Diisi dengan periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. September 2020.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nama dan NPWP pembeli yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, yaitu Badan/Intansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau Pihak Lain yang menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Diisi dengan alamat Badan/Intansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau Pihak Lain yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (7) Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (8) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (9) Diisi dengan Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada penyerahan dilakukan.
- (10) Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada penyerahan dilakukan.
- (11) Diisi dengan tanggal laporan.
- (12) Diisi dengan tandatangan dan dibubuhi dengan stempel Pengusaha Kena Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang membuat laporan.
- (14) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang membuat laporan.

2. LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Masa Pajak : ..... (3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak:

No (4)	Tanggal Transaksi (5)	NTPN		April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/ September*)	
		Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
	Jumlah (8)								

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP ..... (12)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (6) Diisi dengan nomor NTPN atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
- (7) Diisi dengan nomor NTPN atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
- (8) Diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan nilai PPN yang ditanggung pemerintah dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Kode KLU : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...., dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

....., ..... 20.... (11)  
Pemohon,

(12)

..... (13)

\*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (11) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (12) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (13) Diisi dengan nama pemohon.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut/DJBC  
Lembar ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 22/PASAL 23\*)  
NOMOR : ..... (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)  
menerangkan bahwa orang pribadi/badan \*) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Kode KLU : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)

dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., pada saat\*):

- melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- menerima atau memperoleh imbalan dari Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau Pihak Lain sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

.....20... (7)

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (8)

(9)

..... (10)

\*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (7) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23 diterbitkan.
- (8) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
- (9) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
- (10) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2)  
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas  
Pemotongan atau Pemungutan  
Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23

Kepada Yth.  
.....  
..... (3)

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*) yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan\*):

- tidak melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- tidak menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian kami sampaikan.

....., ..... 20.... (6)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (7)  
(8)  
..... (9)

\*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23\*)

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode KLU : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor Pengajuan PIB (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP ..... (12)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

\*\*\*) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Diisi dengan penjumlahan Nilai Impor dan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode KLU : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22:

No. (5)	Jenis Transaksi (6)	Tanggal Transaksi (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP ..... (12)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan jenis transaksi.
- (7) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (8) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 22 yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode KLU : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 23:

No. (5)	Jenis Transaksi (6)	Tanggal Transaksi (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Penghasilan Bruto	PPh 23	Penghasilan Bruto	PPh 23	Penghasilan Bruto	PPh 23
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP ..... (12)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/PASAL 23

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21/Pasal 23 dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21/Pasal 23 dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan jenis transaksi.
- (7) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (8) Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dan nilai PPh Pasal 21/Pasal 23 yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001